

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

111

**MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> BISNIS INDONESIA</li> <li><input type="radio"/> INVESTOR DAILY</li> <li><input type="radio"/> KOMPAS</li> <li><input type="radio"/> KORAN TEMPO</li> <li><input type="radio"/> MEDIA INDONESIA</li> <li><input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT</li> <li><input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA</li> <li><input type="radio"/> REPUBLIKA</li> <li><input type="radio"/> SUARA KARYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA</li> <li><input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN</li> <li><input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN</li> <li><input type="radio"/> TABLOID KONTAN</li> <li><input type="radio"/> THE JAKARTA POST</li> <li><input type="radio"/> MAJALAH GATRA</li> <li><input type="radio"/> MAJALAH TEMPO</li> <li><input type="radio"/> MAJALAH TRUST</li> <li><input type="radio"/> O</li> </ul>
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
---	--	---

JAN	FEB	MAR	APR	<b>MAY</b>	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	<b>31</b>

HALAMAN : 10

TAHUN 2006

**Demo Tolak Pengerukan Pasir Laut**

■ SERANG – Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) kembali menggelar demo di perempatan Ciceri, Kota Serang, Selasa (30/5) siang. Para pengunjuk rasa mendesak Bupati Serang Taufik Nuriman mencabut surat izin yang diberikan kepada tiga perusahaan yang dibolehkan mengeruk 25 juta meter kubik pasir laut selama dua tahun. Pemberian izin itu menyebabkan kesengsaraan kehidupan nelayan.

Bupati Serang, Taufik Nuriman yang dihubungi terpisah hanya berkomentar singkat. Katanya, "Sudahlah, saya tidak mau mengomentari masalah itu. Kan, masih ada bawahan saya." (Imh)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **31**

HALAMAN: **5**

TAHUN 2006

**Antam  
Tingkatkan  
Produksi**

■ **JAKARTA** - Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Dedi A Sumanagara mengatakan harga nikel di pasar dunia akan terus membaik sampai 2010. Saat ini Antam sedang memperluas kapasitas produksi dengan membangun pabrik Feni IV dengan kapasitas produksi diperkirakan 30.000 ton per tahun. "Sekarang sudah berada pada tahap studi kelayakan dan dana yang diinvestasikan mencapai kira-kira Rp 650 miliar," kata Dedi, Selasa (30/5). (swa)

60

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2006

# Bumi to settle \$3.2b in asset sales in June

Leony Aurora  
Bloomberg/Jakarta

**P**T Bumi Resources, Indonesia's biggest coal exporter, expects to conclude a US\$3.2 billion agreement to sell its two coal mining units by the end of June, Finance Director Eddie Soebari said.

A group led by PT Renaissance Capital, an investment bank, will pay for PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia in cash, Soebari said in a telephone interview in Jakarta Wednesday.

He denied a *Financial Times* report that the transaction faces possible delay.

Coal mining companies in Indonesia, which last year overtook Australia as the world's biggest exporter of thermal coal used in power stations, are benefiting as economic growth in China boosts demand for coal to fuel power stations.

Bumi agreed to the sale in March, realizing a more-than-fourfold increase in the value of the assets over the past five years.

"I am confident that the deal will go as planned," Soebari said. "When you have the money, you get the goods."

Bumi is affiliated to the Bakrie Group, which is controlled by the family of Aburizal Bakrie, Indonesia's coor-

dinating minister for welfare.

The transaction may be delayed as Renaissance's potential equity partners imposed "too many conditions" in their offers, prompting Renaissance to talk to an investor who offered bridge financing in the form of convertible bonds, the *Financial Times* reported Wednesday, citing Renaissance President Samin Tan.

Soebari declined to say whether the deal will be canceled if Renaissance cannot come up with the money as scheduled. "Let's just wait until June," he said.

Credit Suisse Group started marketing \$2.1 billion of loans that Jakarta-based Renaissance is seeking to buy the coal mines last week. The deal will be the largest corporate loan for an Indonesian company, *Bloomberg* data show.

Renaissance will borrow \$1 billion for five years, \$600 million for six years, and \$500 million from an eight-year mezzanine loan, according to a banker involved in transaction, who declined to be named.

Tan was the managing partner at the Indonesian unit of Deloitte Touche Tohmatsu before establishing Renaissance. Marubeni Corp. may join the group to buy the coal mines, a spokesman for the Japanese company said.

61

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **31**

HALAMAN : 10

TAHUN 2006

## Asing Tetap Minati Sektor Pertambangan

[JAKARTA] Meskipun dihadang berbagai persoalan, terutama dari aspek kehutanan dan lingkungan, sektor pertambangan Indonesia masih menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi bagi investor asing. Buktinya, perusahaan asal Perancis, Eramet SA pada 2 Mei lalu mengakuisisi 95 persen saham PT Weda Bay Nikel yang memiliki konsesi pertambangan nikel di Teluk Bay, Maluku Utara.

PT Weda Bay Nikel merupakan satu dari 13 perusahaan tambang yang nasibnya terkatung-katung akibat terbenit persoalan tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kawasan hutan lindung. Hingga kini, kendati telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, Weda Bay Nikel tetap sulit melanjutkan kegiatan. Sebab, persoalan lain yang masih berkaitan dengan sektor kehutanan kembali menghadang, yakni munculnya Peraturan Menhut Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

"Sekarang ini kami sedang mengupayakan bisa

diduduk bersama dengan Departemen Kehutanan, untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak. Persoalan ini menyangkut dua sektor, sehingga perlu ada tim di bawah Menko Perekonomian yang akan membahas secara menyeluruh," kata Direktur Jendral Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Sembiring di Jakarta, Selasa (30/5).

### Rancu

Peremenhut tersebut antara lain menyebutkan, perusahaan tambang akan dikenakan semacam royalti (sebagai PNBK bagi sektor kehutanan) sebesar satu persen dari nilai seluruh produksi. Padahal, dalam peraturan yang lain, Menhut juga mengharuskan perusahaan tambang yang mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan lahan kompensasi seluas dua kali lipat dari luas wilayah yang digunakan untuk kegiatan tambang.

Ketentuan royalti sebesar satu persen tersebut sontak diprotes kalangan

pengusaha, juga Departemen ESDM. Direktur Eksekutif PT Interex Sacra Raya, Frans Nongka mengatakan angka satu persen itu sebanding dengan ribuan kali lebih besar dari nilai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditagih Departemen Keuangan dan Iuran Tetap yang ditagih Departemen ESDM.

Sedangkan, menurut Simon Sembiring, kebijakan sektor kehutanan yang cenderung menghambat industri pertambangan itu membuat para investor asing pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia. Padahal, sejumlah perusahaan tambang asing, seperti Eramet SA, telah lama menyatakan berminat menanamkan modal di sektor pertambangan di Tanah Air.

Sementara itu, Presiden Direktur Eramet SA Jacques Bacardats mengatakan, proyek nikel di Teluk Bay akan menjadi proyek terbesar kedua di sektor pertambangan Indonesia setelah proyek Newmont Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat. Bacardats menolak menyebutkan berapa nilai akuisisi saham PT Weda Bay Nickel. [H-13]

62

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

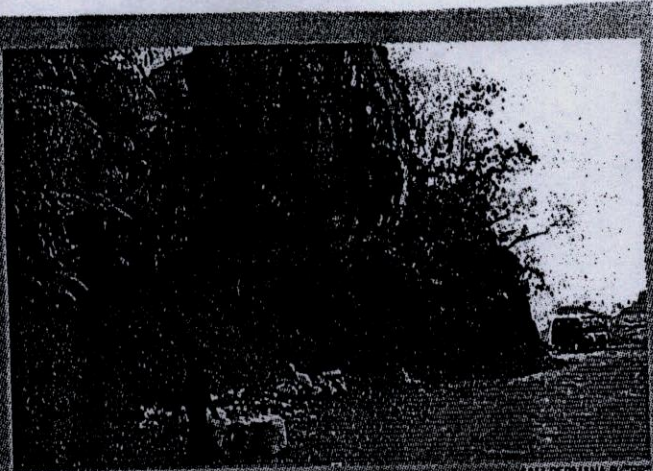
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 20		TAHUN 2006

# Penambangan Liar di Desa Tanjungjaya

## Sulit Dihentikan

**GARUT (PR).**  
 Penambangan galian C jenis batu di Gunung Batu Tumpang Desa Tanjungjaya Kec Banjarwangi dalam satu tahun terakhir ini sangat marak. Penambangan tersebut dikawatirkan akan mengakibatkan terjadinya bencana longsor di Kec Banjarwangi Garut jika tidak segera dihentikan.  
 Untuk itu pemerintahan desa setempat sampai saat ini mengalami kesulitan dalam menghentikan aktivitas penambangan batu di KM. Bandung 98-100 ruas Jalan Raya Cikajang-Pameungpeuk itu. Kami kesulitan menghentikan penambangan karena pelakunya sering kucing-kucingan, kata Kepala Desa Tanjungjaya, Ali Rukandi, Rabu (31/5) kemarin.  
 Menurut Ali Dinas Sumber Daya Air dan Perambungan (SDAP) Garut se-

belumnya telah mengeluarkan surat tentang penghentian penambangan liar di Gunung Batu Tumpang itu. Sayangnya, hanya sebatas surat, tanpa adanya keterlibatan dan Perkab Garut dengan cara turun langsung ke lapangan.  
 Disebutkan pihaknya pun sudah berkali-kali mengirim surat ke dinas terkait tentang perlunya penghentian penambangan di Gunung Batu Tumpang. Kami juga beberapa kali melakukan operasi bersama aparat kepolisian dan bahkan sempat merampas peralatan para penambang. Namun, mereka tetap membandel. Kami datang, penambangan tidak berhenti.  
 Ali juga sempat memperhatikan surat dari Dinas Bina Marga Prov Jabar tertanggal 23 Desember 2005 itu. Sayangnya, menurut bantuan pihak kecamatan Banjarwangi termasuk di dalamnya Kades



**PENAMBANGAN** liar di Gunung Batu Tumpang Kec Banjarwangi Kab Garut semakin marak saja. Sebuah batu di pinggir jalan Desa Tanjungjaya Banjarwangi ini pun menjadi objek penambangan warga seperti terlihat Rabu (31/5) Warga setempat mengharapkan agar Perkab Garut menghentikan penambangan liar tersebut.

Tanjungjaya untuk menerbitkan penambangan liar di Gunung Batu Tumpang.  
 Surat yang ditandatangani Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan A Agusdiansyah, S.H., M.Eng. SC ini ditembuskan antara lain kepada Kepala Bal-



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2006

## Pengusaha Pasir Besi Abaikan Reklamasi

TASIKMALAYA, (PR).-

Para pengusaha pasir besi di Desa Ciandum dan Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya belum melakukan reklamasi kawasan penambangan yang telah rusak. Padahal Bupati Tasikmalaya, sejak Maret lalu telah melayangkan surat keputusan (SK) yang mengharuskan para pengusaha pasir besi melakukan reklamasi.

Kondisi itu membuat sejumlah warga Ciandum dan Ciheras, Rabu (31/5) mempertanyakan efektivitas SK bupati tersebut. Pasalnya, kondisi di lapangan dengan pola penambangan pasir besi yang tidak teratur, tidak sistematis, dan acak-acakan, warga pesimis reklamasi akan berjalan.

"Harus ada pengawasan di lapangan dari dinas terkait. Bukan cuma surat edaran, karena hal itu percuma saja tidak akan ada hasilnya," kata Asep, seorang warga.

Pengangkutan pasir besi dengan truk besar hingga kini masih berlangsung. Dikhawatirkan kondisi jalan yang akan di-hotmix akan terganggu, karena tonase truk sangat berlebihan.

Dayat (52) warga Alur, Desa Ciheras mengatakan, sampai saat ini di lokasi penambangan tidak tampak ada reklamasi dari para pengusaha dan pengangkutan pasir masih berlangsung.

Hal itu karena stok pasir masih tersisa. Namun, Dayat

mengingatkan bila pengusaha mengabaikan reklamasi, akan menjadi preeseden buruk dan menuai protes warga. "Hampir 80 persen warga Ciheras mendesak pemkab agar penambangan pasir besi di Ciheras ditutup saja," tutur Dayat.

Hingga kini, warga tidak pernah merasa diuntungkan dengan adanya penambangan pasir besi.

Dampak dari pengangkutan pasir besi dengan truk besar bukan cuma dirasakan warga Cipatujah, Ciandum, dan Ciheras. Namun, seluruh desa yang dilewati sangat merasakan akibatnya.

Yoyo (53) warga Cimintar, Desa Sirnagalih, Kec. Bantarkalong yang berprofesi sebagai sopir mengaku heran pengangkutan pasir besi kini masih berlangsung.

Padahal, kata Yoyo, SK Bupati Tasikmalaya ihwal penutupan sementara untuk para pengusaha pasir besi sudah diterima. Menurut Yoyo, ia sangat setuju dengan pernyataan Dayat bahwa pasir besi lebih baik ditutup saja, lebih banyak ruginya daripada untungnnya.

"Lihat saja jalan jadi rusak, buat apa jalan diperbaiki kalau truk pasir besi masih berjalan. Cuma menghambur-hamburkan biaya. Ditambah konservasi laut jadi rusak, PAD-nya pun sangat kecil. Pokoknya tutup pasir besi," ujar Yoyo. (E-30)\*\*\*

GA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2006

## Tidak Miliki Izin Lokasi Galian C Ditutup Petugas

TASIKMALAYA, (PR).-

Dua lokasi galian (C) pasir yang ada di Kota Tasikmalaya, Selasa (30/5), ditutup oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penutupan lokasi galian di Tuguraja Kec. Cihideung dan Cipari, Kec. Mangkubumi, karena tidak mengantongi perizinan.

Sebelum penutupan, pihak Satpol PP Kota Tasikmalaya telah melayangkan surat teguran ke pengelola galian pasir dari gantung tersebut. Namun, karena tak diindahkan, Satpol PP diambil langkah penutupan. Penutupan lokasi galian ini dipimpin langsung oleh Wawan Hermawan dari petugas penyidikan PNS di Satpol PP, didampingi puluhan petugas lainnya. Setelah menutup galian C, mereka juga menutup kegiatan di lokasi perumahan Andalusia masih di daerah Mangkubumi. Alasan yang diambil juga sama yaitu, belum mengantongi izin.

Penutupan pertama untuk galian pertambangan pasir dilakukan di daerah Tuguraja. Saat itu, terlihat para penggali pasir lalu-alat berat sedang

melakukan aktivitasnya. Bahkan, sejumlah truk siap untuk membawa pasir.

Petugas lalu memberikan sosialisasi bahwa untuk sementara galian ini ditutup. Mereka diberikan kesempatan hingga pukul 12.00 WIB, untuk persiapan menghentikan aktivitas galian. Petugas sendiri datang sekira pukul 9.00 WIB. Lalu, plang tanda penutupan dipasang di sekitar lokasi galian.

Setelah dari tempat itu, akhirnya puluhan petugas bergerak ke daerah Cipari, Mangkubumi. Di lokasi ini, ada kurang lebih 10 buah kendaraan truk yang siap membawa pasir.

Petugas kembali melakukan pemberitahuan untuk penutupan. Mereka juga memberikan kesempatan kepada yang bekerja untuk melakukan aktivitasnya hingga pukul 12.00 WIB. Setelah itu, semua kegiatan mesti dihentikan.

Para penambang sendiri tidak bisa berbuat banyak, namun mereka bingung kalau galian ini ditutup berarti untuk sementara kehilangan lapangan pekerjaan. (A-97)\*\*\*



UNDANG SUDRAJAT/PR\*

PETUGAS Satpol PP Kota Tasikmalaya memberi penjelasan kepada para penggali pasir di Situ Raja dan Mangkubumi Tasikmalaya yang akan ditutup, Selasa (30/5). Dua lokasi galian pasir itu ditutup karena tak memiliki izin.\*

65

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 26

TAHUN 2006

PERTAMBANGAN

## Holcim Minta Izinnya Diterbitkan

BOGOR, KOMPAS – PT Holcim Indonesia Tbk meminta Bupati Bogor segera menerbitkan surat izin penambangan daerah mereka. Alasannya, penerbitan surat izin itu tidak terkait dengan persoalan biaya pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dipermasalahkan Sekda Pemkab Bogor.

Di lain pihak, Holcim diminta segera memperbarui surat hak pakai tanah tanpa batas yang dikuasainya, karena itu pun bertentangan dengan perundang-undangan.

Demikian antara lain terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Bogor dan manajemen PT Holcim Indonesia Tbk, Dinas Pertambangan, serta Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bogor, Rabu (31/5).

Sidang yang dipimpin Ketua Komisi A Lalu Suryade dan dihadiri semua anggota itu memfokuskan pada perizinan PT Holcim Indonesia yang semula bernama PT Semen Cibinong Tbk.

Direktur Bidang Hukum dan Korporat Holcim Janus O Huta-

pea membenarkan perusahaannya sampai kemarin belum mengantongi perpanjangan Surat Izin Penambangan Daerah (ISPD) Bupati Bogor, yang menjadi dasar untuk bisa menambang tanah liat di Cileungsi. Sebab, ISPD-nya masih atas nama PT Semen Cibinong dan berakhir November 2005. Padahal, pengajuan perpanjangan ISPD sudah dilakukan pada Maret 2005 dan segala persyaratan legal untuk keperluan itu sudah diserahkan lengkap ke Dinas Pertambangan pada Mei 2005. (RTS)

66

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

## Dewan Pertanyakan Izin Penambangan PT Holcim

### BOGOR, (PR).-

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Holcim Indonesia di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor diduga ilegal. Surat izin penambangan daerah (SIPD) yang dimiliki pabrik semen yang semula bernama Semen Cibinong tersebut telah habis masa berlakunya.

Sampai saat ini, pihak Pemkab Bogor belum mengeluarkan SIPD yang baru terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan PT Holcim. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Komisi A DPRD Kabupaten Bogor dengan pihak manajemen PT Holcim Indonesia dan pihak eksekutif di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (31/5).

Dewan juga mempertanyakan persoalan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas perubahan nama PT Semen Cibinong menjadi PT Holcim Indonesia. Pasalnya, pihak PT Holcim Indonesia tidak bersedia membayar BPHTB tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor, Adjat Sudrajat, belum keluarnya SIPD yang diajukan PT Holcim Indonesia tersebut awalnya disebabkan masih adanya persoalan status tanah antara PT Holcim dengan pemerintah Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. Dari total lahan eksploitasi seluas 1.200 hektare, sembilan hektare di antaranya diklaim Desa Nambo sebagai tanah pengangonan.

Persoalan BPHTB yang belum dibayar juga menjadi salah satu bahan pertimbangan pihak Distamben untuk mengeluarkan SIPD kepada PT Holcim. Tapi Ajat mengakui kalau pihaknya telah mengeluarkan surat

keterangan yang menjelaskan kalau SIPD PT Holcim masih dalam proses.

"Kami belum bisa mengeluarkan perpanjangan karena harus berhati-hati terkait dengan adanya persoalan BPHTB," kata Adjat Sudrajat.

Ketua Komisi A Lalu Suryade, M.Si. menyayangkan Distam belum keluar SIPD. "Namun, kami meminta PT Holcim juga aktif mengurus SIPD karena bila belum keluar surat izin tersebut berarti aktivitas eksploitasi PT Holcim ilegal," kata Suryade.

Soal BPHTB PT Holcim, Suryade menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil kajian dan keputusan Dirjen Pajak.

Tak mau bayar Rp 26 M Sementara itu, Direktur Legal dan Korporasi PT Holcim, Jannus Hutapea saat dikonfirmasi wartawan, enggan berkomentar. Namun dalam audiensi itu, Jannus menegaskan pihaknya taat aturan yang ada di Kabupaten Bogor. Makanya, saat ini ia sudah mengajukan SIPD sejak bernama PT Semen Cibinong dan sudah mengajukan perubahan nama dalam perizinan tersebut menjadi PT Holcim.

"Kami memiliki bukti sertifikat tanah pada tanah pengangonan dan itu sudah kami tunjukkan kepada kepala desa," kata Jannus.

Tentang pergantian nama PT Semen Cibinong menjadi PT Holcim, Jannus menegaskan, pihaknya tak terkena pajak. Menurut Jannus, bila Dirjen Pajak menetapkan PT Holcim harus membayar BPHTB, pihaknya bakal melakukan gugatan ke pengadilan. "Kami keberatan bila harus membayar BPHTB yang ditetapkan sebesar Rp 26 miliar," katanya. (A-104)\*\*

67

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2006

DPRD-Pemkab Bandung Bentuk Tim

## Royalti Panas Bumi Terus Dinegosiasikan

**BANDUNG, (PR).-**

Tim yang terdiri dari Pemkab Bandung dan DPRD Kab. Bandung akan segera melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait masalah iuran tetap dan iuran produksi penambangan energi panas bumi Wayang Windu yang berhak didapatkan Pemkab Bandung.

"Bulan-bulan ini, kami (DPRD Kab. Bandung-red.) dan tim dari Pemkab Bandung akan berkonsultasi dengan Pertamina dan Depkeu, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja dewan ke PT Magma Nusantara Ltd. di Kec. Pangalengan yang mengoperasikan penambangan panas bumi Wayang Windu," kata anggota Komisi B, M. Ikhsan, di Soerang, Rabu (31/5).

Menurut Ikhsan, peluang Pemkab Bandung mendapatkan iuran tetap dan iuran produksi berdasarkan UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi masih memungkinkan. "UU tersebut sudah berlaku untuk Wayang Windu unit II yang sedang dalam tahap pembangunan," katanya.

Konsultasi dengan Pertamina dan Depkeu, lanjut Ikhsan, adalah komunikasi birokrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. "Kalau mereka (PT Magma-red.) tetap menutup-nutupi itu, baru kita akan gunakan auditor."

Estimasi pendapatan yang bisa diperoleh Pemkab Bandung, menurut perhitungan kasar Komisi B DPRD, sekitar Rp 576,3 juta jika dihitung per satuan ton uap atau Rp 3,08 miliar jika dihitung per satuan

kwh setiap tahunnya.

Berdasarkan pasal 30 ayat (5) huruf b UU No. 27/2003, Pemkab Bandung berhak memperoleh 32% dari penerimaan negara. Sementara, penerimaan negara (iuran produksi) sebesar 3,75% dari harga jual per kwh.

Meski peraturan pemerintah (PP) dari UU tersebut belum ada, bukan berarti dewan tidak melakukan perhitungan. Sebagai dasarnya adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP).

**Tunggu PP**

Bupati Bandung, H. Obar Sobarna telah menginstruksikan tim yang dipimpin Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Bandung untuk berkonsultasi dengan Pertamina. Rapat dengan Pertamina maupun PT Magma sudah beberapa kali dilakukan untuk membahas sejauh mana aturan dan hak yang bisa diperoleh Pemkab Bandung.

Obar mengatakan, bukan angka 4% atau 34% seperti tercantum dalam UU No. 27/2003, melainkan harus jelas dulu aturannya, karena PT Magma tidak keberatan membayar berapa pun asal sesuai aturan.

Sementara itu, Deni Romli, yang mengatasnamakan konsultan dari General Electric yang disewa DPRD Kab. Bandung, mengaku siap mengaudit kegiatan operasional PT Magma.

Namun, ketika dikonfirmasi, Ikhsan maupun Obar mengatakan belum menyewa konsultan untuk mengaudit audit PT Magma. (A-156) \*\*\*

68

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

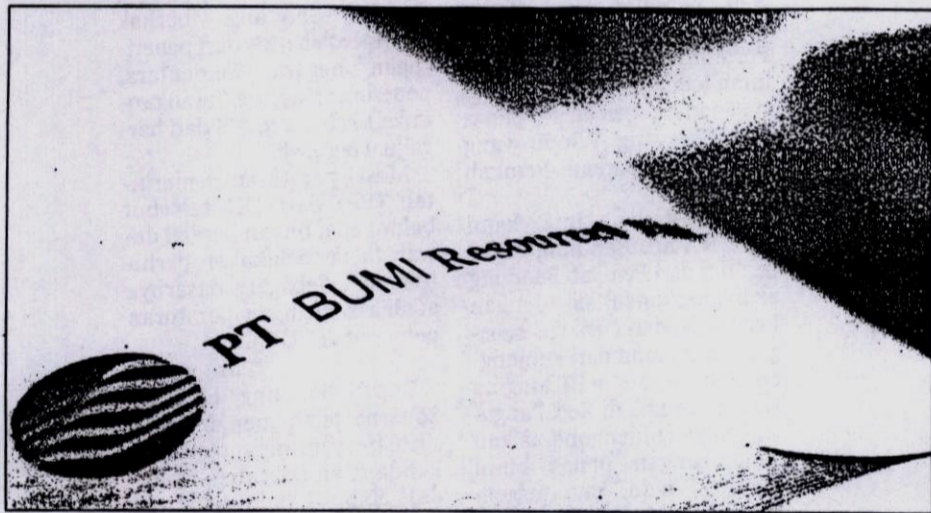
GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2006

## KPC Dibayar Pakai Surat Utang?



MESKI tak lagi memiliki KPC, tambang batu bara terbesar di dunia, saham Bumi Resources (BUMI) tak juga sepi dari rumor. Beberapa waktu lalu ramai rumor soal jadi tidaknya BUMI membagikan keuntungan penjualan KPC dan Arutmin kepada para pemegang sahamnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Mei lalu akhirnya menyetujui pembagian dividen maksimal Rp 190 per saham. Pemegang saham BUMI boleh jadi lega.

Tapi, rumor tak kunjung padam dari BUMI. Hari-hari ini, sebuah rumor baru mulai tersulut. Menurut kabar burung yang beterbangan di jagat bursa, para pemegang saham tak bakal bisa menikmati dividen itu dalam waktu dekat. Pasalnya, kata seorang sumber di bursa, ternyata juragan baru KPC, yakni PT Borneo Lumbung Energi (BLE), kesulitan melunasi transaksi dengan nilai sekitar US\$ 3 miliar itu secara tunai.

Masih menurut rumor itu, BLE yang konon sebagian sahamnya dimiliki Renaissance Capital telah memperoleh dana dari Nirwan Bakrie sebesar US\$ 200 juta sebagai

panjar pembelian BUMI. BLE kabarnya juga sudah mendapat lampu hijau peminjaman duit senilai US\$ 2 miliar dari sebuah bank internasional.

Namun, katanya, ternyata BLE masih butuh dana US\$ 800 juta untuk menutup transaksi tersebut. "Nah, kabarnya dana itu bakal diganti dengan surat utang atau *promissory note*," ujar si pemain. Jika ini benar, bisa jadi rencana bancakan dividen bagi para investor bisa terganjal, nih.

Namun, ketika KONTAN mengonfirmasi kabar panas ini, manajemen BUMI membantah. "Ah, itu tidak benar. Kami sudah menyetakan dana hasil pembelian tersebut dalam bentuk tunai. Urusan pencarian dana, ya, itu urusan mereka," tukas Eddi J. Soebari, Direktur Keuangan PT Bumi Resources.

Tapi, terlepas dari masalah itu, para analis menilai, setelah melepas aset-aset berharganya, prospek saham BUMI tak lagi sebagus dulu. Kecuali jika kabar bahwa BUMI sudah menemukan sumur minyak yang amat besar kandungannya di Yaman benar adanya. □